

Pengaruh Pendapatan Transfer Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Timoer Warih Rianggara¹ | Warsito Kawedar¹

1. Universitas Diponegoro, Indonesia

Correspondence addressed to:

Timoer Warih Rianggara, Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: timoerwarih@students.undip.ac.id

Rianggara, T. W., Kawedar, W. (2025). Pengaruh Pendapatan Transfer Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 24(1), 39-49

Abstract. Poverty remains a prevalent issue across all nations, including developing countries such as Indonesia. This study aims to analyze the impact of transfer income on poverty levels across all provinces in Indonesia. The research population comprises all provinces in Indonesia, with a sample of 34 provinces observed from 2018 to 2022, resulting in a total of 170 samples. This study employs a quantitative method with a multiple regression approach to examine the relationships between variables. The data used are secondary, obtained from the DPJK and BPS websites. The regression estimation model applied is the Random Effect Model (REM), also known as the Generalized Least Squares (GLS) model. The findings indicate that transfer income has a negative and significant impact on poverty levels. The General Allocation Fund (DAU) has a positive and significant effect, while the Special Allocation Fund (DAK) and Revenue Sharing Fund (DBH) have a negative and significant impact on poverty levels.

Keywords: general allocation fund; poverty levels; revenue sharing fund; special allocation fund; transfer income

Pendahuluan

Problema kemiskinan masih menjadi masalah besar sepanjang sejarah sebuah negara. Bahwa dalam sebuah negara, tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan. Menurut (Prawoto, 2009) bahwa kemiskinan telah menjadikan jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya jaminan sosial serta perlindungan terhadap keluarga. Sehingga problematika kemiskinan masih menjadi permasalahan sejak dahulu yang biasa ditemukan di banyak negara termasuknya negara-negara berkembang, salah satunya yaitu Indonesia.

Demikian pula menurut (Kadji, 2012), secara umum suatu keadaan dapat dikatakan miskin apabila ditandai dengan kurangnya atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan pokok lainnya. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor yang berkaitan. Kemampuan masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi itu adalah faktor utama kemiskinan masyarakat. Indonesia sendiri masih menjadi negara dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi.

Mengenai tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, bahwa terlihat sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 menuju tahun 2019 dari 9,82% menjadi 9,41%, namun pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan yang pesat dari 9,41% menjadi 10,14% yang disebabkan oleh meningkatnya kasus pandemi covid-19 di Indonesia, kemudian pada tahun 2021 hingga 2022

mengalami penurunan kembali dari 10,14% menjadi 9,54%, hal ini disebabkan mulai menurunnya kasus covid-19.

Sehingga salah satu upaya pemerintah pusat dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan Pendapatan Transfer (dahulu disebut Dana Perimbangan) kepada pemerintah daerah untuk diolah. Pendapatan Transfer ini diharapkan dapat membantu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah menjelaskan bahwa Transfer ke Daerah atau yang disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tetapi, masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas penggunaan Pendapatan Transfer dalam mengentaskan kemiskinan di berbagai provinsi. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Transfer dapat membantu mengentaskan tingkat kemiskinan, namun terdapat juga penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya.

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Ismail dan Hakim (2014) berkesimpulan bahwa Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Della (2019) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Widyastuti & Nusantara, 2022) menghasilkan bahwa Pendapatan Transfer, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, tetapi hanya pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji pengaruh Pendapatan Transfer terhadap tingkat kemiskinan di setiap daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas penggunaan Pendapatan Transfer dalam mengurangi tingkat kemiskinan di setiap daerah pada periode 2018-2022.

Kajian Pustaka

Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut (Kuncoro, 2003) sebuah paradigma pembangunan yang modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi yang tradisional. Beberapa ekonom modern sudah mulai mengedepankan Dethronement of Gross National Product (Penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang, serta penurunan tingkat pengangguran. Teori pembangunan ekonomi meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dalam suatu wilayah. Dalam konteks ini yaitu pengaruh Pendapatan Transfer terhadap tingkat kemiskinan daerah. Teori pembangunan ekonomi ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana alokasi sumber daya serta kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kemiskinan dan tingkat pendapatan per kapita.

(Adisasmita, 2005) mengatakan bahwa pembangunan wilayah (regional) merupakan sebuah fungsi dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan tenaga kerja, investasi modal, sarana dan prasarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan dalam pendanaan serta pembiayaan pembangunan daerah.

Teori pembangunan ekonomi menekankan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia, infrastuktur, sektor produktif, dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam konteks Pendapatan Transfer, dana yang di alokasikan kepada pemerintah daerah dapat digunakan guna meningkatkan infrastruktur, mengembangkan sektor ekonomi yang berpotensi, memberikan akses pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat modal manusia. Melalui penggunaan Pendapatan Transfer yang efektif, pemerintah daerah dapat menciptakan peluang ekonomi yang baru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan per kapita di daerah masing-masing.

Pendapatan Transfer

Menurut (Mamuka & Elim, 2014) bahwa Pendapatan Transfer yaitu sumber penerimaan daerah yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara dengan tujuan mendorong terlaksananya kewenangan sebuah pemerintah daerah untuk menggapai tujuan dari adanya penyerahan otonomi terhadap pemerintah daerah, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan yang semakin baik, kemudian oleh (Sidik, 2005) bahwa transfer keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah ialah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mana mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah serta pemerataan antar daerah satu dengan lainnya secara proporsional, demokrasi, adil dan transparan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

Pendapatan Transfer diharapkan dapat mampu untuk mendorong setiap daerah agar berkembang serta menciptakan perekonomian yang maju. Adapun Pendapatan Transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Menurut (Ismail & Hakim, 2014) dana alokasi umum memiliki tujuan guna memeratakan kemampuan keuangan antar daerah serta penggunaan untuk membiayai urusan pemerintahan salah satunya yaitu menurunkan tingkat kemiskinan.

Dana alokasi umum terhadap suatu daerah dialokasikan berdasarkan dasar celah fiskal serta alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah. Kemudian kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah guna melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Di mana setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, serta indeks pembangunan manusia. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana bagi hasil.

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Besaran Dana alokasi khusus ditentukan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana pemerintah menetapkan kriteria dana alokasi khusus berupa kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa, Dana Transfer Khusus

adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk ikut membiayai kegiatan khusus, baik yang bersifat fisik maupun tidak, fisik ini yang merupakan permasalahan daerah.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, dana bagi hasil merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara tertentu dan manfaat tertentu, yang dibagikan kepada daerah produktif dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara negara (pusat) dengan daerah, serta dengan daerah non produktif lainnya untuk mengatasi keadaan tersebut.

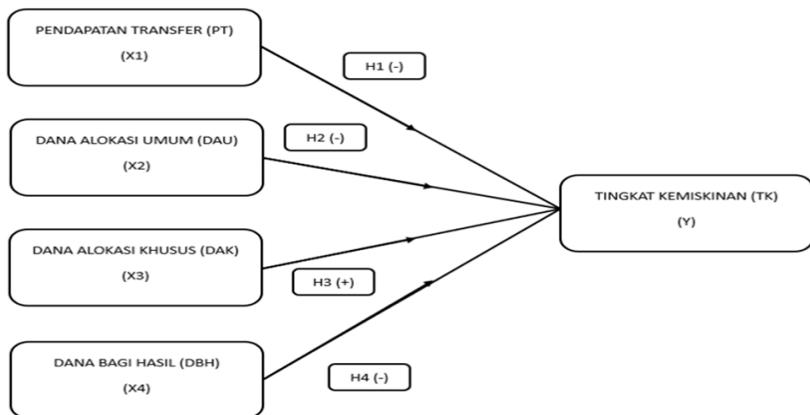
Kemiskinan

Definisi kemiskinan sangatlah luas dan sektor ekonomi merupakan salah satu aspek yang sering dikaitkan dengan permasalahan ini. Berbagai metode telah digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan dan memperdalam permasalahannya hingga sampai pada kerangka teori yang lebih mudah dipahami (Bawimbang, 2021). Menurut (Yulianto 2019), ada jenis kemiskinan berdasarkan satuan waktu. Kemiskinan ini adalah kemiskinan yang disengaja, kemiskinan musiman, kemiskinan yang terus-menerus, dan kemiskinan siklis. Kemiskinan yang tidak disengaja adalah keadaan kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah atau faktor-faktor di luar kendali manusia, seperti bencana alam, yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan musiman merupakan keadaan kemiskinan yang sering dialami oleh para pekerja tergantung musim, misalnya nelayan dan petani tradisional. Kemiskinan persisten merupakan suatu keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh proses turun-temurun dan biasanya terdapat pada lingkungan keluarga. Kemiskinan siklis merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh roda perekonomian global.

Pengembangan Hipotesis

Terdapat beberapa penelitian telah dilakukan guna menganalisis pengaruh pendapatan transfer terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh (Fatmi et al., 2023) tentang pengaruh produk domestik regional bruto dan dana perimbangan terhadap kemiskinan, hasilnya yaitu bahwa dana alokasi umum berpengaruh berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. (Hermawan, 2023) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh alokasi transfer ke daerah dan dana desa terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021, dengan hasil yaitu bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Tengah. (Putra et al., 2023) meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengentasan kemiskinan pada Provinsi di Indonesia, dengan temuan bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh pendapatan transfer terhadap tingkat kemiskinan sehingga tercipta kerangka pemikiran teoretis pada penelitian ini yang dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pendapatan Transfer yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Karena kemiskinan dikaitkan dengan ketimpangan, (Fatmi et al., 2023) menyatakan bahwa Pendapatan Transfer dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Transfer diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Pernyataan ini konsisten dengan (Mukherjee, 2023) dan (Chude et al., 2019) menyatakan bahwa Pendapatan Transfer berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga dari penjelasan di atas, maka peneliti mengambil hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Transfer berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan.

Menurut (Machfud et al., 2020), Dana Alokasi Umum merupakan sebuah dana yang dianggarkan untuk pemerintah daerah serta tercantum di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana tersebut nantinya akan ditransfer oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk memeratakan pendapatan serta membiayai program-program di daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi. Pemberian dana alokasi umum dapat memperkuat kondisi fiskal daerah.

Dana Alokasi Umum yang telah diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Kemiskinan berkaitan dengan ketimpangan, maka (Fatmi et al., 2023) berpendapat bahwa DAU bisa dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga setiap kenaikan DAU diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Pernyataan ini selaras dengan (Mukherjee, 2023) dan (Chude et al., 2019) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan. Sehingga dari penjelasan di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan.

Menurut (Syarifah et al., 2022), Penggunaan dana alokasi khusus adalah untuk investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan fasilitas fisik dan prasarana kehidupan ekonomi jangka panjang. Termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas fisik pendukung. Karena hibah khusus cenderung meningkatkan aset tetap pemerintah dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi angka kemiskinan, maka alokasi hibah khusus diperkirakan akan mempengaruhi alokasi anggaran modal. Pernyataan serupa didukung oleh studi yang dilakukan oleh (Silas et al., 2018) dan (Rasu et al., 2019) bahwasanya Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dari Penelitian terdahulu di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan.

Sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, alokasi dana bagi hasil merujuk pada persentase dari pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta pencapaian kinerja tertentu. Kemudian dana ini didistribusikan ke daerah penghasil dengan maksud untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta ke daerah-daerah non penghasil dalam rangka untuk mengatasi dampak negatif dan/atau meningkatkan pemerataan wilayah secara keseluruhan. Dana yang tersedia bisa dipakai untuk membangun daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kebijakan penggunaan dana bagi hasil sejalan dengan upaya untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan memperkuat integrasi pembangunan di seluruh negeri. Nany et al (2022) dalam hasil studinya berpendapat bahwa kenaikan dana bagi hasil akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Pernyataan ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh (Mukherjee, 2023), (Chude et al., 2019) dan (Rasu et al., 2019) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dari penjelasan di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan.

Metode

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistika Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menganalisis pengaruh pendapatan transfer terhadap tingkat kemiskinan di seluruh daerah di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh provinsi di Indonesia dalam jangka 2018-2022. dengan menggunakan quota sampling yaitu berjumlah 34 provinsi dikarenakan pada tahun yang digunakan untuk penelitian belum muncul provinsi baru seperti Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, sehingga jumlah sampel keseluruhan yang digunakan berjumlah 170 sampel.

Terdapat lima variabel yang diuji pada penelitian ini, yaitu: pendapatan transfer, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil sebagai variabel bebas, kemudian tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan pengujian model menggunakan analisis regresi linier berganda dengan melakukan analisis regresi data panel dengan bantuan software Eviews 10 Version.

Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 P_{Tit} + \beta_2 D_{AUit} + \beta_3 D_{AKIt} + \beta_4 D_{BHIt} + e_{it}$$

Keterangan :

Y	= Tingkat Kemiskinan
A	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
PT	= Pendanaan Transfer
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DBH	= Dana Bagi Hasil
i	= Cross-section, Provinsi di Indonesia
t	= Time-series, Tahun 2018-2022
e	= Variabel Mengganggu (error)

Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Pada Tabel 1, disajikan rata-rata, median, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimal. Sehingga, penjelasan tabel tersebut yaitu bahwa jumlah sampel berjumlah 170. Variabel Pendapatan Transfer memiliki nilai terkecil sebesar 5.437,880 di Provinsi Gorontalo pada tahun 2022, nilai terbesar sebanyak 73.292,610 yaitu di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dan nilai rata – rata sebanyak 11.547,08, serta nilai standar deviasinya sebesar 15.663,808. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai terkecil sebesar 0 yaitu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dikarenakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak mendapat kucuran Dana Alokasi Umum dari pusat, nilai terbesar sebanyak 41.794,670 yaitu di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, dan nilai rata – rata sebanyak 11.547,080, serta nilai standar deviasinya sebesar 9.192,191. Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai terkecil sebesar 1.026,270 yaitu di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022, nilai terbesar sebanyak 22.460,039 di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021, dan nilai rata-rata sebanyak 5.561,359, serta nilai standar deviasinya sebesar 5.026,780. Variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai terkecil sebesar 71,120 yaitu di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022, nilai terbesar sebanyak 38.792,126 yaitu di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dan nilai rata-rata sebanyak 3.552,121, serta nilai standar deviasinya sebesar 5.147,718. Variabel Tingkat Kemiskinan memiliki nilai terkecil sebesar 3,470 yaitu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2019 , nilai terbesar sebanyak 27,740 yaitu di Provinsi Papua pada tahun 2021, dan nilai rata-rata sebanyak 10,539, serta nilai standar deviasinya sebesar 5,451.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Rata-rata	Median	Standar Deviasi	Nilai Minimum	Nilai Maksimal
PT	170	20.657,740	15.888,000	15.663,807	5.437,880	73.292,610
DAU	170	11.547,080	8.410,530	9.192,191	0	41.794,670
DAK	170	5.561,359	3.846,920	5.026,780	1.026,270	22.460,039
DBH	170	3.552,121	1.502,405	5.147,718	71,120	38.792,126
TK	170	10,539	8,765	5,451	3,470	27,740

Sumber : Olahan Data Sekunder (2024)

Pemilihan Model Terbaik

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Terdapat tiga model regresi dalam regresi data panel, yaitu model common effect, fixed effect, dan random effect. Penentuan model regresi, dilakukan dengan tiga uji yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange untuk masing-masing model penelitian. Hasil pemilihan model terbaik pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pemilihan Model Terbaik

Model	Chow	Hausman	Lagrange
Hipotesis Nol	CEM lebih baik daripada FEM	REM lebih baik daripada FEM	CEM lebih baik daripada REM
Hipotesis Alternatif	FEM lebih baik daripada CEM	FEM lebih baik daripada REM	REM lebih baik daripada CEM
Signifikansi	0,182	1,000	0,000

Keterangan	H0 diterima	H0 DIterima	H0 DItolak
Kesimpulan	Model <i>Random Effect</i> terbaik		

Sumber : Olahan Data Sekunder (2024)

Analisis Regresi Linier

Analisis regresi linier ini dilakukan dengan analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini menggunakan model random effect. Hasil analisis regresi dengan bantuan pengolahan software Eviews 10 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
PT	0,778	0,306	2,588	0,010
DAU	0,571	0,224	2,540	0,012
DAK	-0,849	0,221	-3,838	0,000
DBH	-0,254	0,056	-4,482	0,000
C	-1,591	0,776	-2,048	0,042
Adjusted R ² 0,208		Durbin- Watson stat 0,067		

Sumber : Olahan Data Sekunder (2024)

Persamaan regresi yang diperoleh dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

$$TKit = -1,591 + 0,778Ptit + 0,571DAUit + -0,849DAKit + -0,254DBHit + uit$$

Berdasarkan tabel di atas didapatkan kesimpulan bahwa koefisien konstanta sebesar -1,591 yang apabila semua variabel independen konstan maka Tingkat Kemiskinan akan sama dengan -1,591. Kemudian untuk koefisien pendapatan transfer sebesar 0,778 menunjukkan bahwa apabila nilai pendapatan transfer naik satu satuan dan faktor lain tidak berubah, maka nilai tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,778 satuan. Untuk koefisien dana alokasi umum sebesar 0,571 menunjukkan bahwa jika nilai dana alokasi umum meningkat satu satuan sementara faktor lain tetap, maka nilai tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,571 satuan. Sedangkan koefisien dana alokasi khusus sebesar -0,849 menunjukkan apabila nilai dana alokasi khusus meningkat satu satuan sementara faktor lain tetap, maka nilai tingkat kemiskinan akan menurutn sebesar 0,849 satuan. Begitu juga dengan dana bagi hasil nilai koefisiennya sebesar -0,254 menunjukkan bahwa apabila nilai dana bagi hasil meningkat satu satuan sementara faktor lain tetap, maka nilai tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,254 satuan.

Uji Hipotesis

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji statistik t. Berikut hasil yang di tampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
PT	0,778	0,306	2,588	0,010
DAU	0,571	0,224	2,540	0,012
DAK	-0,849	0,221	-3,838	0,000
DBH	-0,254	0,056	-4,482	0,000
C	-1,591	0,776	-2,048	0,042
Adjusted R ² 0,208		Durbin- Watson stat 0,067		

Sumber : Olahan Data Sekunder (2024)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan transfer memiliki dampak terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai statistik sebesar 2,588 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,010 (kurang dari 0,05), sehingga terdapat hubungan positif dan signifikan dalam hubungan pendapatan transfer

terhadap tingkat kemiskinan. Maka hipotesis satu penelitian ditolak. Dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan memiliki nilai statistik sebesar 2,540 dengan signifikansi sebesar 0,012 (kurang dari 0,05), sehingga hubungan dana alokasi umum dengan tingkat kemiskinan terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Maka hipotesis dua penelitian ditolak. Dampak dana alokasi khusus terhadap tingkat kemiskinan memiliki nilai statistika sebesar -3,838 dengan signifikansi sebesar 0,000 (kurang dari 0,05), sehingga hubungan dana alokasi khusus dengan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang negatif dan signifikan. Maka hipotesis tiga penelitian ditolak. Sedangkan dampak dana bagi hasil terhadap tingkat kemiskinan memiliki nilai statistik sebesar -4,482 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (kurang dari 0,05), sehingga hubungan dana bagi hasil dengan tingkat kemiskinan terdapat hubungan yang negatif dan signifikan. Maka hipotesis empat diterima.

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan transfer memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan transfer yang diberikan, maka semakin tinggi juga tingkat kemiskinan di suatu daerah, dan sebaliknya. Temuan ini cukup mengejutkan sebab secara teori seharusnya pendapatan transfer berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian oleh (Mukherjee, 2023) dan (Chude et al., 2019) yang menyatakan bahwa pendapatan transfer berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Fatmi et al., 2023) sesuai dikarenakan hasil dari penelitiannya justru memiliki korelasi positif dengan tingkat kemiskinan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum maka semakin tinggi juga tingkat kemiskinan, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang diajukan. Studi yang dilakukan oleh (Isramiwarti et al., 2017) juga menemukan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan akibat kesalahan dalam pengelolaan dana oleh pemerintah daerah. Kesalahan tersebut mencakup alokasi yang tidak efektif serta penggunaan dana untuk proyek-proyek yang tidak mendukung kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertentangan dengan temuan dari (Mukherjee, 2022) dan (Chude et al., 2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang berpendapat bahwa dana alokasi umum dapat dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, kenaikan dana alokasi umum seharusnya memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan secara efektif.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan dana alokasi khusus memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin besar alokasi dana yang diterima oleh daerah, maka tingkat kemiskinan di daerah cenderung menurun. Begitu juga dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti hubungan ini signifikan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah dana lokasi khusus yang dialokasikan ke suatu daerah, maka semakin rendah tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Namun, temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Peter Silas et al., 2018) dan (Rasu et al., 2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) justru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Perbedaan hasil ini menarik untuk dikaji lebih lanjut guna memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan temuan di berbagai penelitian.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan dana bagi hasil memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ini berarti peningkatan alokasi dana bagi hasil berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di daerah, karena dana tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta membuka peluang ekonomi

bagi masyarakat. Studi yang dilakukan oleh (Nany et al., 2022) juga menunjukkan bahwa peningkatan dana bagi hasil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mukherjee, 2023), (Chude et al., 2019), dan (Rasu et al., 2019) yang menemukan bahwa dana bagi hasil memiliki korelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, semakin tinggi alokasi dana bagi hasil di suatu daerah, semakin rendah angka kemiskinan di daerah tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Transfer merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun, efektivitasnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya korelasi positif antara pendapatan transfer dan tingkat kemiskinan mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan dana ini. Dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran, pengawasan yang ketat, serta sinergi antarprogram pembangunan, diharapkan pendapatan transfer dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Meskipun penelitian ini menemukan bahwa dana alokasi umum memiliki korelasi positif terhadap tingkat kemiskinan, hasil ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengelolaan dana transfer daerah. Pemerintah daerah perlu lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana alokasi umum agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, dana alokasi umum dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa semakin besar alokasi dana yang diterima suatu daerah, semakin rendah tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dana alokasi khusus yang digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan beberapa studi sebelumnya yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Perbedaan temuan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk efektivitas penggunaan dana, tata kelola pemerintahan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan di setiap daerah. Untuk memastikan bahwa dana alokasi khusus benar-benar memberikan manfaat maksimal dalam pengentasan kemiskinan, diperlukan pengelolaan yang lebih transparan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta pengawasan yang lebih ketat dalam implementasinya. Dengan demikian, dana alokasi khusus dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan adanya dana bagi hasil, daerah dapat memperoleh dana tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan menciptakan peluang kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, sebagaimana yang juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi dana bagi hasil yang diterima memiliki kemungkinan tingkat kemiskinan provinsi menjadi lebih kecil.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, H. Rahardjo. (2005). Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bawimbang, P. M., Rorong, I. P., & Siwu, H. D. (2021). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).

- Chude, N. P., Chude, D. I., Anah, S., & Chukwunulu, J. I. (2019). *The relationship between government expenditure, economic growth and poverty reduction in Nigeria*. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) e-ISSN, 2321-5933
- Fatmi, E., Sirojuzilam, & Irsad. (2023). *The effect of gross domestic product and equalization funds on poverty in districts in the Province of Aceh*. In Jurnal Mantik (Vol. 7, Issue 2). Online.
- Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali.
- Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga:Jakarta
- Machfud, M., & Asnawi, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia), 5(1), 14-31.
- Mamuka, V., & Elim, I. (2014). Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. EMBA, 2, 646–655.
- Mukherjee, S. (2023). Is Fiscal Decentralization a means to Poverty and Inequality Reduction?: An India–China Comparative Study. In Social Sector Spending, Governance and Economic Development (pp. 111-125). Routledge India.
- Nany, M., Pratama, D. B., & Kusumaningsih, A. U. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.
- Pravoto, N., & Selatan, J. L. (2009). Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. In Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (Vol. 9, Issue 1).
- Putra, T., Sayifullah Sayifullah, & Syaifudin, R. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi Di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen, 2(4), 240–258. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i4.1413>
- Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. M. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. In Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah (Vol. 20, Issue 4).
- Sidik, Machfud, B. Raksasa Mahi, Robert Simantjuntak, &Bambang Brodjonegoro. (2005). Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Silas, M. P., Wawire, N. H., & Onono Okelo, P. A. (2018). *Effects of Fiscal Decentralization on Poverty Reduction in Kenya*. In International Journal for Innovation Education and Research www.ijier.net (Issue 6).
- Widyastuti, A., & Nusantara, A. (2022). Does fiscal decentralization affect poverty? An Empirical Study. Economics Development Analysis Journal, 11(3), 305-312.